**BAB II**

**PENGARUH PERLUASAN NATO KE EROPA TIMUR TERHADAP KONFLIK UKRAINA**

1. **Gambaran Umum NATO**
2. **Lahirnya NATO**

NATO lahir pada 4 April 1949 dengan penandatanganan *North AtlanticTreaty* di Washington D.C. oleh 12 negara (Belanda, Belgia, Denmark, Inggris, Italia, Islandia, Luxembourg, Norwegia, Perancis dan Portugal) ditambah dua negara Amerika Utara (Amerika Serikat dan Kanada). Mereka bertekad “menjaga perdamaian dan mempertahankan kebebasan melalui solidaritas politik dan pertahanan militer yang memadai dan, jika perlu, memukul kembali semua bentuk agresi yang ditujukan pada mereka”[[1]](#footnote-2) Pembentukan NATO menurut pendiriannya sejalan dengan Pasal 51 Piagam PBB yang menekankan hak melekat untuk mempertahankan diri baik sendiri maupun secara kolektif.

Segera seusai Perang Dunia II, ketegangan antara AS dan Uni Soviet berlangsung. AS dan negara-negara Eropa Barat memandang dominasi Soviet di Eropa Timur sebagai ekspansionisme. Pihak Soviet memandang dominasi AS pada beberapa bagian dunia, seperti di Amerika Latin, sebagai imperialisme Amerika. Untuk membangun kembali negara-negara Eropa Barat yang hancur akibat PD-II, mereka melakukan program rekonstruksi besar-besaran. Untuk itu Pemerintah AS membantu penyediaan dana sebesar $ 13 milyar untuk jangka waktu 1948-1952 melalui program Rencana Marshall. Selain agar ekonomi Eropa Barat segera bangkit kembali, juga untuk membendung pengaruh komunisme. Bantuan AS itu dimungkinkan karena neraca pembayaran AS saat itu surplus sehingga perlu dimanfaatkan untuk investasi politik dan strategis serta menunjukkan besarnya komitmen AS terhadap Eropa Barat.

Sejalan dengan rekonstruksi itu, negara-negara Eropa Barat melakukan demobilisasi angkatan perang mereka dari 4,7 juta menjadi 900.000 pasukan pada 1946. Mereka menyadari bahwa tanpa dukungan AS maka secara militer mereka lebih lemah dibandingkan Uni Soviet yang mempertahankan kekuatan pasukannya sebesar 4 juta orang, meskipun ekonomi Soviet lemah. Ketimpangan jumlah pasukan antara blok Barat dan Timur itu diimbangi dengan penempatan pasukan AS di dua negara yang ia taklukkan yakni di Jerman (dan Jepang) serta pemilikan senjata nuklir oleh AS. Kehadiran pasukan AS di Eropa setidaknya bisa meredam friksi lama antarnegara Eropa yang dapat berakibat kelabilan.

Menurut sejarawan Melvyn Leffler, AS harus memupuk para mitranya agar secara ekonomi kuat dan secara politik kohesif, menurutnya “*neither an integrated Europe,* *nor a united Germany nor an independent Japan must be permitted to emerge as a third force.”[[2]](#footnote-3)* Karena itu Henry Kissinger menyatakan bahwa politik AS terhadap Eropaselalu amat ambivalent: “*it has urged European unity while recoiling before its* *consequences.”[[3]](#footnote-4)* Karena itu sesudah Perang Dingin, AS tetap menginginkan peran utama dan memegang kepemimpinan dalam aliansinya dengan Eropa (dan Asia) serta melindungi diri agar aksesnya pada minyak di Timur Tengah tak terhalangi.

Keamanan bersama hal lain untuk pertimbangan berkenaan dengan peran dan misi NATO. Keamanan kolektif dapat dilihat secara luas sebagai "suatu pengaturan yang melibatkan intervensi multilateral oleh sekelompok negara yang diarahkan terhadap agresi internasional atau konflik internal yang mengancam perdamaian umum dan stabilitas sebuah negara atau wilayah. Konsep keamanan internasional merupakan inti dari keamanan bersama.[[4]](#footnote-5)

Blokade Soviet atas Berlin (yang dibagi empat zona: AS, Inggris, Perancis dan Uni Soviet) dari 24 Juni 1948 sampai 9 Mei 1949 dan kudeta di Czekoslovakia, 22 Februari 1948 yang dilakukan Partai Komunis setempat lebih mendorong terbentuknya pakta pertahanan NATO. Pada 1949, Uni Soviet berhasil memproduksi senjata nuklir. Monopoli pemilikan senjata nuklir tidak lagi dipegang AS. Inggris juga memiliki bom nuklir pada 1952 dan Perancis pada 1964.

1. **Perluasan NATO**

Perluasan NATO pertama terjadi pada tahun 1952 ketika Turki dan Yunani bergabung ke dalam NATO. Pada 7 Mei 1954 Inggris dan AS menolak upaya Uni Soviet untuk bergabung dalam NATO.[[5]](#footnote-6) Jerman Barat sebaliknya diajak bergabung dalam NATO pada saat ditandatanganinya Persetujuan Paris, 23 Oktober 1954; Jerbar dan Italia masuk dalam *Western European Union (WEU).* Enam bulan kemudian Jerbar menjadi anggota NATO, 5 Mei 1955. Sembilan hari setelah Jerbar bergabung dalam NATO, Pakta Warsawa dibentuk. Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia dan Romania menandatangani Traktat Warsawa, 14 Mei 1955. Secara ideologis para anggota Pakta Warsawa sama-sama menganut komunisme. Sebagian pasukan Soviet di Eropa Timur sekaligus berfungsi mengawasi/memata-matai negara-negara satelit Soviet. Kekuatan militer Pakta Warsawa terletak pada *unified command* dan *weapon standardization* meskipun kurang memadai untuk dipergunakan sebagai kekuatan ofensif.

Perluasan NATO berlanjut. Spanyol menjadi anggota NATO yang ke-16 pada 30 Mei 1982. Hasil referendum yang diadakan PM Felipe Gonzalez pada 12 Maret 1986 menunjukkan bahwa rakyat Spanyol mendukung agar Spanyol tetap dalam NATO, tanpa berpatisipasi dalam *NATO’s integrated military structure*.

Runtuhnya tembok Berlin 1989 menandai berakhirnya pembagian blok (Barat dan Timur). Ancaman ekspansi Soviet lenyap. Namun, politik luar negeri Rusia tetap ingin mempertahankan kesetaraannya dengan AS sebagai negara nuklir, tetap memainkan peranan yang dominan di negara-negara pecahan Uni Soviet dan menjadi peserta aktif yang berpengaruh dalam masalah-masalah internasional. Penerimaan kapitalisme oleh banyak negara komunis pada akhir 1980-an menggerogoti ikatan ideologis yang sebelumnya menyatukan negara-negara blok Timur dalam visi bersama, menghadapi masalah-masalah keamanan. Di kalangan aliansi Barat sebaliknya terdapat perbedaan tentang doktrin strategis, kontrol persenjataan, pangkalan-pangkalan AS di wilayah negara-negara sekutunya dan khususnya *“out-of-area conflicts”* (konflik di luar batasbatas geografis tradisional NATO). Karena tak ada lagi ketakutan akan suatu perang dunia baru dan Perang Dingin telah berakhir maka sejumlah kalangan mempertanyakan apakah persekutuan pertahanan masih diperlukan. Banyak kritikus menilai bahwa “NATO dan Pakta Warsawa hanya memperlama Perang Dingin sehingga keberadaan keduanya tidak lagi diperlukan.”[[6]](#footnote-7)

Masalah pokok lain menyangkut Jerman. Menurut Lord Ismay, Sekjen pertama NATO, tujuan asli aliansi Atlantik dapat disarikan menjadi “*to keep the Russians out, the* *Americans in, and the Germans down”.* Pada 1990, timbul kekhawatiran akan suatu *Fourth Reich* (yakni satu negara Jerman yang bersatu dan kuat dan berpotensi ekspansionis). Uni Soviet menarik kembali keberatannya akan penyatuan kembali Jerman dan menyetujui penarikan kekuatan militernya dari Eropa. Soviet tidak membuat konsesi tanpa syarat. Soviet menekankan bahwa unifikasi Jerman harus disertai pengurangan angkatan perang Jerman dan bahwa AS mempertahankan kehadiran militernya dalam NATO, di bumi Jerman. Jerman memenuhi seluruh persyaratan tersebut. Pada September 1990 Empat Besar (AS, Uni Soviet, Inggris dan Perancis) dan dua Jerman (Barat dan Timur) merundingkan suatu perjanjian di Moskow yang mengakhiri hak empat negara besar tersebut atas Jerman. Para pemimpin Jerman tidak mempunyai klaim wilayah di Eropa, termasuk di Polandia yang dianeksasinya sewaktu Perang Dunia II. Juga Jerman berjanji untuk tidak memiliki senjata nuklir dan mengurangi pasukannya dari 670.000 menjadi 370.000 tentara (sebagai imbalan ditariknya 370.000 serdadu Soviet dari Jerman). Jerman dan bekas Uni Soviet juga menandatangani perjanjian bilateral yang menjanjikan kedua negara tidak akan saling menyerang.

Pihak Barat menyambut baik persetujuan tersebut dan konsesi Soviet yang melambangkan penarikan segera Uni Soviet dari Eropa Timur yang selama itu dipandang sentral bagi keamanannya dan melambangkan bergesernya geostrategi pengaruh NATO ke dalam pusat Pakta Warsawa, yang secara formal dibubarkan pada 1991. Pada awal 1990-an banyak pihak menganggap perlu untuk mengganti NATO dan Pakta Warsawa yang telah dibubarkan dengan suatu pengaturan keamanan yang baru. Namun Presiden George Bush Sr. dan Bill Clinton bertekad melanjutkan aliansi keamanan dan berjanji untuk mempertahankan pasukan AS di Eropa serta bahwa AS akan tetap menjadi tulang punggung NATO.[[7]](#footnote-8)

Berakhirnya Perang Dingin tidak menyurutkan hasrat untuk menambah keanggotaan NATO, dengan masuknya Polandia, Republik Czeko dan Hungaria pada

1999. Dengan perluasan NATO ini maka perbatasannya jauh bergeser ke timur langsung.

Perluasan NATO setelah berakhirnya Perang Dingin, sebut saja sebagai NATO baru, nampaknya mengarah pada *Euro-Atlantic collective security organization (CSO)* daripada *traditional military alliance.* Terdapat perbedaan antara keduanya. Yang pertama lebih bersifat inklusif, artinya sebanyak mungkin negara ikut di dalamnya, sedangkan yang kedua bersifat selektif dan eksklusif. Aliansi kadang-kadang ditujukan, baik secara implisit maupun eksplisit, terhadap lawan tertentu. NATO sulit dikatakan sebagai CSO kecuali jika hampir seluruh negara Eropa diterima sebagai anggota. Tetapi kita tahu bahwa NATO tidak akan menerima keanggotaan seluruh negara Eropa. Karena itu NATO baru, sebagian bersifat aliansi tradisional, sebagian merupakan CSO. Meskipun NATO menjadi persekutuan militer terkuat di dunia, ia dapat berperan sebagai penjaga perdamaian yang terlatih, sebagaimana telah dilaksanakan di Bosnia (dalam rangka persetujuan Dayton) dan di Afghanistan (setelah AS menyerang rezim Taliban yang dianggap melindungi kelompok Al Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden).

Meskipun NATO juga memiliki dimensi politik dan ekonomi namun NATO terutama merupakan suatu persekutuan militer untuk melindungi para anggotanya terhadap suatu serangan bersenjata. Masalahnya akan sulit dipecahkan jika konflik bersenjata terjadi di antara sesama anggota NATO, seperti pernah terjadi di Cyprus, yang melibatkan Turki dan Yunani. Dengan bergabungnya beberapa negara ETT dalam NATO maka seluruh anggota NATO berkewajiban pula untuk pertahanan dan keamanan serta memajukan demokrasi di ETT. Bisa jadi masuknya sejumlah negara ETT tidak semata-mata untuk melindungi diri mereka dari ancaman Rusia, tetapi juga agar mereka dianggap termasuk “Barat”, sehingga keanggotaan dalam NATO dapat mempermudah mereka masuk dalam Uni Eropa. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena Turki yang telah menjadi anggota NATO selama 53 tahun ternyata belum diterima sebagai anggota Uni Eropa karena pertimbangan tertentu.

Penggabungan beberapa negara ETT dalam NATO tidak serta merta menghilangkan sama sekali risiko keamanan yang berasal dari ketidakstabilan kawasan dan bukannya ancaman militer tradisional. Selain itu terdapat persepsi yang berbeda antara sekutu di Barat yang memandang perluasan NATO ke timur akan meningkatkan stabilitas Eropa, sedangkan sekutu baru di timur memandang NATO sebagai *lifeguard* untuk memproteksi kemerdekaan mereka dari lawan potensial, khususnya Rusia. Daya tarik NATO bagi mereka justru pada pasal 5 piagam NATO, yang melindungi mereka jika terjadi agresi. Mereka mengharapkan jaminan perlindungan dari AS, bukan sekedar ingin jadi anggota suatu asosiasi dan konsultasi politik dalam hal terjadinya masalah keamanan. Agar suatu aliansi militer dapat diandalkan maka ia harus merupakan tameng keamanan yang *credible*, bukannya sekedar pelindung keamanan secara psikologis.

Mantan Menlu AS Madeline Albright pernah menyatakan: *NATO is a defensive* *alliance that ... does not regard any state as its adversary, certainly not a democratic and* *reforming Russia.[[8]](#footnote-9)* Pernyataan itu tidak menjelaskan mengapa banyak elite Eropa Timur menginginkan negara-negara mereka bergabung dalam NATO dan janji AS untuk melindungi mereka. Juga jika NATO tidak menganggap ada suatu negara (yang berpotensi) sebagai musuh, mengapa NATO diperluas? Selain itu konsekuensi biaya bagi perluasan NATO amat besar, yang diperkirakan antara $ 21 milyar sampai $ 125 milyar[[9]](#footnote-10) tergantung pada misi yang akan diemban dan jenis ancaman yang akan dihadapi. Pemerintah AS bisa saja berangan-angan bahwa biayanya dapat ditekan sampai $ 35 milyar dan bahwa negara-negara Eropa akan membayar 94 % biayanya.[[10]](#footnote-11) Namun para anggota NATO itu sulit diharapkan untuk menyediakan dana yang lebih besar untuk pertahanan, pada saat mereka tidak dalam keadaan terancam keamanannya. Apalagi mereka terbiasa menggantungkan diri pada Washington yang menyediakan 60% budget NATO.

Masalah yang dihadapi AS sebenarnya bukan karena ETT dalam bahaya tetapi justru keberadaan NATO sendiri. Jika misi NATO tidak jelas dan potensi ancaman juga begitu maka mengapa NATO dipertahankan, bahkan diperluas? Seandainya suatu ketika Rusia menjadi anggota NATO, atau bahkan seluruh negara Eropa masuk NATO. Akan timbul pertanyaan besar karena suatu persekutuan militer tentunya untuk mempertahankan yang masuk di dalamnya untuk menghadapi yang berada di luarnya. Dalam hal demikian siapa yang akan dihadapi NATO? Selain itu, perbatasan NATO yang semakin ke timur akan langsung berhadapan dengan China. Jika itu sampai terjadi maka China dapat menyimpulkan bahwa perluasan NATO sebenarnya ditujukan pada China. Hal itu memang baru pertanyaan yang bersifat hipothesis Namun memang tidak mudah menerima alasan perluasan NATO untuk apa dan ditujukan pada siapa.

Kenyataannya, pemerintah negara-negara Eropa dan AS (juga Kanada) tetap menginginkan NATO ada. Hal itu berarti pihak AS akan tetap terikat untuk menempatkan pasukan AS di Eropa. Makna lain: AS terus memberikan subsidi bagi pertahanan Eropa. Andaikata subsidi semacam itu dipergunakan untuk membantu mengatasi kemiskinan negara-negara berkembang maka sasaran dalam MDG’s akan tercapai. Sementara ini pihak Eropa terus mengembangkan perekonomian mereka lewat Uni Eropa, yang kini jumlah anggotanya telah mencapai 28 negara. Ekonomi Eropa yang berkembang pesat sah-sah saja, asalkan tidak merugikan negara-negara berkembang.

Senator Richard Lugar menyatakan bahwa NATO harus “*go out of area or go out of business”[[11]](#footnote-12)* Karena itulah NATO ikut “membenahi” Bosnia dan Kosovo, yang beradadi luar wilayah geografis operasi NATO meskipun hal itu bersifat jangka pendek.Demikian juga halnya di Afghanistan. Pasukan-pasukan NATO ikut menjaga perdamaiandi sana. Belum dapat diprediksikan kapan tugas semacam itu akan berakhir. Kehadiranpasukan AS di Eropa dapat saja memberikan *political leverage* pihak AS terhadap Eropa.Kenyataannya, pada waktu pasukan Uni Soviet dalam keadaan kuat para pemimpin EropaBarat dapat merasa tenang dengan keberadaan pasukan AS di Eropa, merekamenyempatkan diri membuat bisnis dengan pihak Soviet untuk memperoleh kontrak gasalam Soviet pada 1980-an.

Jauh sebelum itu, masalah “out of area” sudah dihadapi NATO. Ketika Presiden Nasser menasionalisasi Terusan Suez pada 26 Juli 1956, pihak AS dapat memahami keberatan Inggris dan Perancis namun Washington menentang penggunaan kekerasan terhadap Mesir. Menlu AS, John Foster Dulles menganggap “*inappropriateness of the* *proposition that NATO should deal with Suez-type crises”[[12]](#footnote-13)* Penolakannya, antaralain karena masalah Suez sedikit banyak berkaitan dengan soal kolonialisme. Interpretasi legalistic Dulles menurut Kissinger cukup valid. Meskipun demikian masalah “*out of area”* menyulitkan AS untuk mendapat dukungan sekutunya di Eropa dalam hal Perang Vietnam dan ketika AS melakukan *airlift* untuk membantu Israel dalam perang di Timur Tengah 1973.

Bersamaan dengan adanya ekspansi NATO, aliansi ini juga berusaha untuk mendukung transformasi di negara-negara bekas pengaruh Uni Soviet di Eropa Tengah dan Timur seperti Hungaria, Polandia dan Cekoslovakia yang menjadi pelopor negara Eropa Timur yang mengajukan aplikasi sebagai anggota NATO.[[13]](#footnote-14)

Salah satu alasan mengapa negara-negara Eropa Timur tertarik untuk masuk menjadi anggota NATO seperti dikutip dalam Harian Slovakia, Pravda, 3 April 2004, Menlu AS Collin Powell mengatakan: “I say that perhaps you’re small, you’re not rich and you have no large armies, but now you have won a new big partner in the U.S. and a new big partner in NATO.”[[14]](#footnote-15)

Negara-negara Eropa sudah terbiasa menikmati proteksi pertahanan mereka oleh AS, tanpa mereka menanggung beban politik dan ekonomi. Pihak AS juga menyenangi hal itu, tapi lebih bersifat politis daripada militer. Juga para kontraktor di AS, yang merupakan pelobi utama pendukung perluasan NATO, akan terus menyuplai berbagai jenis peralatan militer baru dan canggih bagi pasukan NATO, termasuk negara-negara ETT.

Pada 1951 Jendral Dwight D. Eisenhower yang menjadi Panglima NATO pertama dan kemudian menjadi presiden AS pernah menyatakan bahwa AS harus membatasi jangka waktu keberadaan pasukan AS di Eropa. Sepuluh tahun kemudian, ia memperingatkan bahwa *“permanent troop establishment abroad would discourage the* *development of the necessary military strength Western European countries should* *provide themselves”[[15]](#footnote-16)* Dengan makin lama berada di Eropa, bahkan makin diperluas jangkauannya maka misi AS dalam NATO dapat dianggap gagal.

1. **Profil Kekuatan Militer NATO**

Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) adalah organisasi politik awalnya dimaksudkan untuk melindungi kebebasan dan keamanan seluruh anggota di bawah prinsip-prinsip Piagam PBB. Untuk itu, Aliansi memiliki cara-cara politik dan militer yang akan digunakan terhadap setiap ancaman yang mungkin timbul terhadap keamanan anggotanya. Meskipun NATO awalnya diciptakan pada tahun 1949 untuk membela Eropa Barat dari agresi dari Uni Soviet, transformasi dialami sejak jatuhnya Tembok Berlin yang mengakibatkan perubahan struktur, organisasi, kemampuan dan tujuan strategis yaitu dalam hal kemampuan militer. Untuk tujuan ini, NATO memperbaharui struktur komando dan potensi kekuatan. Ancaman berbahaya bagi NATO adalah proliferasi senjata pemusnah massal dan sarana penyebarannya, serta peralatan militer musuh dengan teknologi canggih. Tujuan dasar NATO pada awalnya terdapat dalam mukadimah *North Atlantic Treaty* yaitu:

...*They are determined to safe guard the freedom, common heritage, and civilization of their peoples, founded on the principles of democracy, individual liberty and the rule of law...to unite their efforts for collective defence and for the preservation of peace and security…[[16]](#footnote-17)*

Tujuan awal NATO kemudian bertransformasi menjadi aliansi pertahanan untuk menangkal ancaman agresi dari Uni Soviet di eropa Barat. Hal ini tertuang dalam Artikel V organisasi tersebut yang menekankan pada perlindungan bersama:

*“The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack agaainst them all and consecuently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self defence recognised by article 51 of the charter of the united nations, will assist the party or parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and mantain the security of the north atlantic area. Any such armed attack and all measures taken as a result there of shall immediately be reported to the Security Council. Such measures shall be terminated when the Securit Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and security”.[[17]](#footnote-18)*

Konsep Strategi NATO menekankan pada keamanan aliansi dan pemeliharaan kondisi keseimbangan strategis secara keseluruhan di wilayah Eropa. Kekuatan pertahananan NATO kemudian di perkuat dengan penerapan doktrin strategis *Massive Rataliation.* Doktrin ini kemudian dengan *Flexible Response* dalam tahun 1960 sehubungan dengan kemajuan teknologi rudal CEP dan daya ledak hulu nuklir. Kekuatan pertahanan ini ditambah dengan diadakannya penggelaran *Theater Nuclear Forces* (TNF).[[18]](#footnote-19)

1. **Kekuatan Personil**

NATO (North Atlantic Treaty Organization) dibentuk pada tahun 1949. Pada awalnya, keanggotaan NATO berjumlah 12 negara anggota yang sekaligus meratifikasi pembentukan nato pada tanggal 4 April 1949 yaitu Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Denmark, Inggris, Italia, Kanada, Luxemburg, Norwegia, Perancis, Portugal, dan Islandia. Kemudian pada tahun 1952, Yunani dan Turki masuk menjadi anggota NATO, dan selanjutnya diikuti oleh Republik Federasi Jerman atau Jerman Barat yang menjadi anggota pada tahun 1955. Pada tahun 1966 Perancis keluar dari struktur integrasi militer NATO meskipun masih memiliki wakil dalam pakta pertahanan itu. Spanyol bergabung ke dalam NATO pada tahun 1982 tetapi berada di luar struktur integrasi NATO. Pada tahun 1999, Cekoslovakia, Polandia, dan Hungaria masuk menjadi anggota NATO. Pada tahun 2004, Bulgaria, Estonia, Latvia. Lithuania, Romania, Slovakia dan Slovenia bergabung menjadi anggota NATO. Hingga saat ini, negara anggota NATO bertambah menjadi 28 negara dengan masuknya Albania dan Kroasia pada tahun 2009.

Negara yang tergabung kerjasama militer dan terikat dalam NATO, membuat anggotanya disyaratkan untuk meningkatkan pembiayaan militernya. Ekspansi NATO dijustifikasi sebagai cara untuk menyebarkan nilai demokrasi dan menangkal kemungkinan agresi Rusia di masa akan datang. Sebelumnya pada tahun 2003, Perang Irak memaksa dan membagi anggota NATO menjadi dua bagian. Perancis dan Jerman menolak dengan tegas adanya perang. Turki juga terhadap menolak adanya serangan Amerika Serikat di Irak. Di saat yang sama, NATO menjadikan Rumania sebagai salah satu negara anggotanya dan makin meluas ke wialayah timur.

NATO mulai menggunakan militernya untuk mengatasi masalah kolektif politik kepentingan, termasuk stabilitas regional. Sejak Perang Dunia II, khususnya selama Perang Dingin, keamanan Eropa sangat tergantung pada perlindungan AS melalui NATO AS membelanjakan 300 milyar U.S Dollar (40-45 persen dari anggaran Militer Dunia. sedangkan UE total menghabiskan 170 Milyar U.S dollar.[[19]](#footnote-20)

Penggunaan GDP sebagai faktor untuk memaksimalkan kekuatan, negara anggota NATO membelanjakan sekitar setengah dari total pembiayaan militer dunia. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat menempatkan sekitar 300.000 pasukan militernya di Eropa yang dilengkapai dengan pesawat penyerang, tank, dan peralatan lainnya. Setelah Perang Dingin berakhir, kekuatan personel kemudian dipangkas sekitar 100.000 personel. Tetapi, NATO tetap terbentuk hingga sekarang dikarenakan negara anggotanya percaya bahwa NATO menjamin adanya stabilitas walaupun misi yang diembannya belum tercapai. Artikel V dalam NATO mempertimbangakan tentang makna NATO dalam menjaga pertahanan negara sesama anggota jika terjadi serangan. Hal ini menjadi salah satu komitmen Amerika Serikat untuk membantu sistem pertahanan di Eropa Barat dalam melawan hegemony Uni Soviet.[[20]](#footnote-21)

Struktur komando NATO berevolusi selama Perang Dingin dan akibatnya, 16 negara anggota diperkirakan memiliki kekuatan sekitar 5,252,8003 militer aktif, termasuk sebanyak 435.000 pasukan AS dikerahkan di bawah struktur komando. Pada tahun 2000, pasukan NATO aktif berkisar pada jumlah 3.448.590 ke 3.986.045 pada tahun 2001. (mengalami penambahan sekitar 16 persen). Saat ini, 28 anggota NATO mempertahankan kekuatan 3,793,7785 militer aktif, termasuk 137.836 pasukan dikerahkan oleh Amerika Serikat.[[21]](#footnote-22)

Saat ini, Pasukan NATO yang berasal dari berbagai negara anggotanya sedang terlibat dalam dalam perang melawan Taliban di Afganistan. Sejak tahun 2006, pasukan ini dikenal dengan nama ISAF (*International Security Assistance* *Forces*) dibawah komando NATO. Hampir 50.000 pasukan NATO ditempatkan dalam ISAF.

**Tabel 2 Data kemampuan pertahanan negara anggota NATO tahun 2015**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Negara** | **Populasi** | **Personil Aktif** | **GDP** **(dalam juta USD)** | **Anggaran Militer (%GDP)** |
| Albania | 3,020,209 | 14.500 | 13.262 | 1,0 |
| Belanda | 16,877,351 | 47.500 | 866.354 | 1,2 |
| Belgia | 10,449,361 | 24.500 | 534.672 | 1,0 |
| Bulgaria | 6,924,716 | 35.000 | 55.837 | 1,6 |
| Rep. Ceko | 10,627,448 | 21.057 | 205.658 | 1,6 |
| Denmark | 5,569,077 | 15.000 | 340.806 | 1,3 |
| Estonia | 1,257,921 | 3.209 | 25.953 | 2,0 |
| Hungaria | 9,919,128 | 19.000 | 137.104 | 0,9 |
| Inggris | 64,105,700 | 205.851 | 2.945.146 | 2,2 |
| Islandia | 317,351 | 210 | 16.693 | 0,03 |
| Italia | 61,680,122 | 180.000 | 2.147.952 | 1,5 |
| Jerman | 80,996,685 | 180.675 | 3.859.547 | 1,2 |
| Kanada | 34,834,841 | 68.000 | 1.788.717 | 1,0 |
| Kroasia | 4,470,534 | 18.000 | 57.159 | 1,5 |
| Latvia | 2,165,165 | 6.000 | 31.976 | 1,3 |
| Lithuania | 3,505,738 | 15.839 | 48.232 | 0,8 |
| Luksemburg | 520,672 | 1.057 | 62.395 | 0,5 |
| Norwegia | 5,147,792 | 26.200 | 500.244 | 1,4 |
| Prancis | 66,259,012 | 222.215 | 2.846.889 | 2,2 |
| Polandia | 38,346,279 | 120.000 | 546.644 | 1,9 |
| Portugal | 10,813,834 | 47.660 | 230.012 | 1,9 |
| Rumania | 21,729,871 | 73.350 | 199.950 | 1,3 |
| Slovakia | 5,443,583 | 16.000 | 99.971 | 1,0 |
| Slovenia | 1,988,292 | 7.300 | 49.506 | 1,0 |
| Spanyol | 47,737,941 | 123.000 | 1.406.855 | 0,9 |
| Turki | 81,619,392 | 620.473 | 806.108 | 2,2 |
| Yunani | 10,775,557 | 109.070 | 238.023 | 2,2 |
| USA | 318,892,103 | 1.369.532 | 17.418.925 | 3,5 |
| **Total** | **906,002,051** | **3.745.000** | **37.480.584** | **2,5** |

(Sumber: Globalfirepower.com)

1. **Kekuatan Persenjataan**

Anggaran militer NATO dalam setiap tahunnya memiliki memiliki jumlah terbesar diantara anggaran lainnya. Lebih dari setengah dana pengeluaran NATO digunakan untuk membayar biaya operasional dan pemeliharaan staf militer internasional. NATO menghabiskan dana sekitar US$ 220 miliar untuk biaya kekuatan militer. Anggaran ini mencakup biaya administrasi yang berhubungan dengan kegiatan militer organisasi tersebut, termasuk armada operasi dan badan pemeliharaan. Dalam segi persenjataan NATO memiliki 11.505 tank, 13.664, 22.790 kendaraan lapis baja, 1.327 helikopter penyerang, 3.802 pesawat tempur, 211 kapal induk, 133 kapal selam.72 . Dalam persenjataan nuklir, Amerika Serikat memiliki 12.000, Perancis 350 dan inggris 185.

NATO juga memiliki sejumlah akses militer di wilayah Eropa dan yang berbatasan dengan wilayah Rusia yaitu:

**Tabel 3: Persebaran basis militer NATO dan US di Eropa:**

|  |  |
| --- | --- |
| Bosnia dan Herzegovina | Basis Eagle di Tuzla (EU/US), (pasukan PBB), kamp McGovern, BrckoEUFOR) Mostar ‘basis Eropa. (Selatan dan timur) Bosnia dan Herzegovina, pabrik logam Banja Luka, di utara dan barat Bosnia dan Herzegovina. |
| Bulgaria | Area pelatihan di Novo Selo, basis militer diNovo Selo, pangkalan udara dekat Plovdiv |
| Republik Ceko dan Polandia | Basis pertahanan misil |
| Serbia, Kosovo | Camp Bondsteel, bases militer di Urosevac |
| Turkey | Pangkalan udara Incirlik di Adana |
| Romania | Basis militer di Mihail kogalniceanu, Constanza Badabag, Cincu and tempat latihan di Smardan |
| Guam (AS) | Basis Camp Andersen |
| Kyrgiztan | Basis NATO-US di Manas/Ganci |

(Sumber: SIPRI Policy Paper No. 18. <http://books.sipri.org/files/PP/SIPRIPP18.pdf>)

1. **Gambaran umum Ukraina**
2. **Sejarah Ukraina**

Ukraina dikenal sebagai “Kievan Rus” hingga abad ke-16. Pada abad ke-9, Kiev adalah pusat politik dan budaya utama di Eropa Timur. Kievan Rus mencapai puncak kekuasaan di abad ke-10 dan berakhir pada tahun 1240 akibat invasi yang dilakukan oleh pasukan Mongol. Dari abad ke-13 hingga abad ke-16, Kiev kemudian berada di bawah pengaruh Polandia. Pada tahun 1654, Ukraina meminta perlidungan Tsar dari Rusia terhadap Polandia, kemudian perjanjian Peresayaav ditandatangani dan Ukraina lalu menjadi wilayah kedaulatan Kekaisaran Rusia.[[22]](#footnote-23)

Perang dunia I secara tidak langsung memberikan semangat kemerdekaan Ukraina dari Kekaisaran Tsar Rusia bangkit. Saat terjadi revolusi Bolshevik pada Oktober 1918, Ukraina berhasil memerdekakan diri. Namun kemerdekaan itu tidak bertahan lama, pada 1920, Ukraina kembali terlibat perang dengan Tentara Merah yang merupakan pengganti dari Kekaisaran Tsar Rusia. Pada 1922, Ukraina menjadi salah satu bagian dari republik sosialis Soviet selama kurang lebih 70 tahun.

Sebuah bangsa independen Ukraina terbentuk pasca runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Parlemen Ukraina SSR menyatakan kedaulatan pada 16 Juli 1990 dan kemudian pada 1 Desember 1991 mayoritas rakyat Ukraina memilih keluar dari Uni Soviet melalui refendum. Pada saat yang bersamaan, Kravchuk teroilih sebagai presiden Ukraina, pada saat itu beberapa perkembangan telah terjadi di Ukraina, salah satunya pembubaran partai komunis dan pengembangan infrastruktur untuk angkatan bersenjata Ukraina yang independen.[[23]](#footnote-24)

Pada bulan Desember 1991, runtuhnya Uni Soviet membawa serta Ukraina bersama Rusia dan Belarusia menjadi negara penetus Commonweakth of Independence State (CIS), sebuah organisasi negara-negara yang sebelumnya merupakan bagian reoublik Uni Soviet. Pada awal kemerdekaan, pembangunan, pemerintahan, politik serta ekonomi berlangsung lambat. Hal ini ditandai dengan banyaknya pengangguran, naiknya inflasi hingga gagalnya produksi.

1. **Sistem Pemerintahan Ukraina**

Ukraina adalah sebuah negara demokrasi parlementer dengan eksekutif terpisah, peradilan dan cabang legislative. Dalam aturan konstitusi 1996, presiden adalah kepala negara dan dipilih langsung oleh rakyat untuk jangka waktu lima tahun dan dapat dipilih kembai tapi tidak dapat lebih dari dua periode. Presiden adalah panglima angkatan bersenjata dan dapat memveto perundang-undangan. Kekuasaan Presiden diatur dalam artikel 102 konstitusi Ukraina. Presiden diberikan tugas untuk menjaga kedaulatan dan presiden harus diberikan kewenangan untuk mengkonsolidasikan keamanan wilayah Ukraina. Presiden merupakan penjamin kebebasan warga negara Ukraina. Presiden juga dapat membatalkan atau mencabut kebijakan lembaga negara yang merugikan negara.

Presiden bekerjasama dengan semua cabang kekuasaan, menunjuk, dan memberhentikan pejabat pemerintah dan otoritas eksekutif, menghadiri rapat atau siding pemerintahan dengan wakil rakyat di parlemen dan mahkamah konstitusi Ukraina. Presiden sebagai kepala negara bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri dan bertindak atas nama Ukraina untuk melakukan negosiasi dan perjanjian internasional. Hal ini diatur dalam artikel 102 dan 106 pasal 3,4 dan 5 bahwa Presiden member petunjuk pada Perdana Menteri yang menunjuk menteri cabinet yang nanti akan diminta persetujuan dari badan legislative. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan.[[24]](#footnote-25)

Presiden ukraina dapat diberhentikan oleh Rada Verkhovna. Kepusutan pemberhentian presiden oleh Rada Verkhovna harus seusai dengan prosedur *impeachment* yang diatur konstitusi. Mahkamah konstitusi menerima rekomendasi Rada Verkhovna untuk melakukan *revie.*

Legislatif Ukraina adalah kamar tunggal yang bernama Rada Verkhovna (*supreme council*). Rada Verkhoivna memiliki 450 anggota tunggal, kursi yang tersisa dialokasikan secara proporsional kepada pihak yang telah mendapatkan setidaknya 4% dari suara nasional. Semua anggota mempunyai masa jabatan selama empat tahun. Di antara hak prerogatifnya, Rada Verkhovna memiliki hak untuk mengubah konstitusi, mensahkan undang-undang, membuat anggaran dan mendakwa atau *impeachment* presiden.ketua Rada Verkhovna dapat mensahkan undang-undang tanpa persetujuan presiden.

Amandemen konstitusi yang berlaku pada tahun 2006, bergeser kekuatan yang signifikan dari presiden ke perdana menteri dan Rada Verkhovna. Konstitusi ini dibuat untuk mentransfer keuasaan, terutama berkenaan dengan penujukan menteri dan presiden ke perdana menteri.

Pengadilan tertinggi di Ukraina adalah Mahkamah Konstitusi, yang bertugas melindungi dan menafsirkan konstitusi. Presiden, legislative dan sebuah konferensi hakim menunjuk enam dari 18 setiap anggota pengadilan. Mahkamah angung adalah pengadilan banding tertinggi untuk masalah nonkonstitusional.[[25]](#footnote-26)

1. **Ukraina Dalam Kancah Internasional**

Kebijakan luar negeri Ukraina mengadopsi nilai pendekatan strategis yang diperlukan untuk hubungan dengan negara-negara asing, kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional, promosi kepentingan nasional dan perlindungan hak-hak warga dan diaspora di luar negeri.

Tujuan strategis kebijakan luar negeri Ukraina meliputi Eropa dan integrasi Euro-Atlantik, membentuk hubungan aliran kemitraan strategis dengan AS, Uni Eropa, dan Federasi Rusia, kerjasama dengan negara-negara anggota CIS dan GUAM, keterlibatan aktif dengan PBB dan organisasi internasional lainnya, partisipasi efektif dalam ekonomi global dengan perlindungan yang maksimal dari kepentingan nasional, dan transformasi Ukraina menjadi kekuatan regional.[[26]](#footnote-27)

Ukraina memiliki hubungan formal dengan banyak negara dan dalam beberapa decade terakhir telah membangun hubungan diplomatic dengan lingkaran memperluas bangsa. Hubungan luar negeri Ukraina dipandu oleh sejumlah prioritas utama yang digariskan dalam kebijakan luar negeri Ukraina. Ukraina menganggap integrasi Euro-Atlantik adalah tujuan utama kebijakan luar negerinya, tetapi dalam prakteknya penyeimbangan hubungan dengan Eropa dan AS selalu terkendala dengan adanya kekuatan politik dari Rusia.[[27]](#footnote-28)

The European Union Partnership and Cooperation (PCA) dengan Ukraina mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1998. Uni Eropa (UE) telah mendorong Ukraina untuk melaksanakan PCA sepenuhnya sebelum diskusi dimulai pada perjanjian asosiasi. Strategi umum UE terhadap Ukraina, yang dikeluarkan pada KTT Uni Eropa pada bulan De3sember 1999 di Helsinki, mengakui aspirasi jangka panjang Ukraina tetapi tidak membahas hubungan.[[28]](#footnote-29)

Sebelumnya, pada tanggal 31 Januari 1992, Ukraina bergabung pada Konferensi Keamanan dan Kerjasama di Eropa (sekarang Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa –OSCE), pada tanggal 10 Maret 1992, Ukraina menjadi anggota dari Dewan Kerjasama Atlantik Utara. Ukraina juga memiliki hubungan dekat dengan NATO dan telah menyatakan minat dalam keanggotaannya. Mantan Presiden Viktor Yuschenko menunjukkan bahwa ia mendukung Ukraina bergabung dengan Uni Eropa di masa depan. Rencana untuk keanggotaan Ukraina kedalam NATO disimpan Yanukovich saat terpilih menjadi presiden Ukraina pada tahun 2010.

Yanukovich memilih untuk menjaga Ukraina sebagai negara non-blok, ini terwujud pada tanggal 3 Juni 2010 ketika parlemen Ukraina (Rada Verkhovna) dengan 226 orang anggotanya mengajukan”integrasi ke dewan keamanan Euro-Atlantik NATO” dari stgrategi keamanan nasional negara itu memberikan negara status non-blok. “Integrasi Eropa” adalah bagian dari nasional strategi keamanan dan kerjasama Ukraina dengan NATO. Hubungan Ukraina kemudian dianggap NATO sebagai suatu kemitraan. Ukraina dan NATO terus mengadakan seminar bersama dan latihan strategis.[[29]](#footnote-30)

Ukraina mempertahankan hubungan damai dan konstruktif dengan semua negara tetangganya, hubungan Ukraina dengan Rusia dan Polandia sangat dekat. Kemudian hubungan dengan Rusia dipersulit oleh ketergantungan energy oleh tunggakan pembayaran. Namun, hubungan telah membaik dengan ratifikasi 1998. Kedua belah pihak telah menandatangani serangkaian kesepakatan pembagian final dan disposisi bagi mantan negara bagian Soviet.

Ukraina telah menjadi anggota Commonwealth of Independence States (CIS) pada tanggal 8 Desember 1991, namun pada Januari 1993 menolak untuk mendukung rancangan piagam untuk memperkuat politik, ekonomi dan hubungan pertahanan antara anggota CIS, dan benar-benar berhenti untuk berpartisipasi sebagai anggota pada bulan Maret 2014. Selain itu, Ukraina juga merupakan salah satu pencetus dari GUAM (Georgia-Ukraina-Azerbaijan-Moldova).

Pada tahun 1999-2001, Ukraina menjabat sebagai anggogta tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Secara historis, Soviet Ukraina bergabung dengan PBB pada tahun 1945 sebagai salah satu anggota asli berikut kompromi Barat dengan Uni Soviet, yang telah meminta kursi untuk 15 republik Soviet. Ukraina telah konsisten mendukung perdamaian, negosiasi sengketa pemukiman, berpartisipasi dalam pembicaraan Quadripartite tentang konflik Moldova dan mempromosikan resolusi damai untuk konflik di negara bekas Soviet Georgia. Ukraina juga telah membuat kontribusi besar untuk PBB sebagai penjaga perdamaian operasi sejak tahun 1992.[[30]](#footnote-31)

Sebagai salah satu negara pecahan Uni Soviet, Ukraina merupakan poros geopolitik yang cukup penting dan strategis di kawasan Eurasia, dan harus berada dalam lingkup pengaruh AS dan Uni Eropa. Maka, diluncurkanlah skenario Revolusi Warna, sebagai bagian integral dari perang asimetris AS untuk menaklukkan Ukraina dan membendung Rusia. Penggulingan presiden Ukraina Viktor Yanukovich sesungguhnya merupakan gerakan terencana dan sistematis berkat kerjasama antara partai-partai oposisi dengan bantuan AS dan Uni Eropa, khususnya Jerman. Hal ini terlihat jelas ketika Presiden Yanukovich memutuskan untuk menerima bantuan dari Rusia dan menunda kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa, lalu dengan serta merta sebagian rakyat Kiev, Ibu Kota Ukraina, meledak dalam gelombang anti Yanukovhich.

Sebagai salah satu negara pecahan Uni Soviet, Ukraina sebenarnya sudah dipetakan oleh AS sejak 1997, Zbigniew Kazimiers Brzezinski, mantan ketua Dewan Keamanan Nasional (National Security Council) di era pemerintahan Jimmy Carter, menerbitkan buku yang cukup menarik bertajuk The Grand Chessboard pada 1997. Dalam buku yang cukup menarik tersebut, Brzenzinski menulis, “Ukraina, ruang baru dan penting pada papan catur Eurasia, dan merupakan poros geopolitik karena sangat penting keberadaanya sebagai negara merdeka, untuk membantu mengubah Rusia”.[[31]](#footnote-32)

Tanpa Ukraina, lanjut Brzenzinski, tidak akan mungkin lagi menjadi sebuah imperium di kawasan Eurasia, dan jika suatu saat Moskow mendapatkan kembali control atas Ukraina, maka dengan 52 juta orang berikut sumber daya alam serta akses ke Laut Hitam, Rusia otomatis akan mendapatkan kembali kedigdayaannya untuk menjadi negara kekaisaran (imperium) yang kuat, mencakup kawasn Eropa dan Asia.

Dalam bukunya, Brzezinski secara tajam dan rinci menguraikan makna dan hakekat dari poros geopolitik. Menurut mantan penasehat kemanan nasional Jimmy Carter yang saat ini juga merupakan arsitek kebijakan politik luar negeri Barrack Obama, yang dimaksudkan sebagai poros geopolitik adalah negara-negara yang nilai pentingnya bukan berasal dari kekuasaan atau motivasinya, melainkan dari lokasi geografisnya yang cukup sensitif.[[32]](#footnote-33)

Sehingga dalam beberapa kasus, negara-negara yang masuk kategori poros geopolitik tersebut, memainkan peran khusus, yang barang tentu ssecara geopolitik punya nilai yang cukup strategis. Baik untuk memberikan akses ke wilayah-wilayah penting terhadap suatu negara tertentu, atau sebaliknya menolak untuk dijadikan negara satelit sebuah negara adidaya.

Dalam perspektif geopolitik tersebut, Brzezinski memasukkan beberapa negara pecahan Uni Soviet seperti Ukraina, Azerbaijan, dan Georgia sebagai poros geopolitik. Krisis geopolitik yang terjadi di Ukraina pada Februari 2014 dan dengan tumbangnya Presiden Yanukovich, nampaknya harus dipahami dalam prespektif geopolitik Brzezinski. Bahwa Ukraina yang merupakan salah satu poros geopolitik di kawasan Eurasia, harus berada dalam pengaruh orbit AS dan sekutu-sekutu strategisnya seperti Uni Eropa dan NATO.

Seperti yag ditegaskan Brzezinski dalam The Grand Chessboard, “Eurasia merupakan papan catur dimana perjuangan bagi keunggulan global harus tetap dimainkan Amerika”. Bisa dimengerti jika sejak 1991 AS dan sekutu-sekutu Eropa Baratnya telah member bantuan keuangan sebesar 5 miliar USD untuk Ukraina. Ukraina dalam prespektif Brzezinski, harus tetap berada di dalam lingkup pengaruh AS dan sekutunya di Uni Eropa.[[33]](#footnote-34)

1. **Dinamika Konflik Ukraina**
2. **Faktor Penyebab Konflik Ukraina**

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Ukraina sentar diberitakan perihal berbagai konflik berkepanjangan yang terjadi di Ukraina, potensi konflik adalah besar, dan sebab-sebabnya mungkin sangat kompleks. Konflik sosial dan politik, baik yang terbuka maupun yang tersembunyi.

Saat ini Ukraina adalah negara yang berdaulat, negara ini mendapatkan kemerdekaanya setelah melepaskan diri dari U8ni Soviet pada tahun 1991. Namun, bersama dengan Georgia, negara-negara bekas Yugoslavia, dan negara-negara lainnya yang tergabung dalam CIS, Ukraina menjadi sasaran geopolitik dari Rusia dalam hubungannya dengan Asia Tengah dan Eropa Barat.

Negara-negara leburan Uni Soviet tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi Rusia sendiri. Untuk bisa mengendalikan negara-negara CIS, tentunya Rusia punya strategi untuk mengontrol mereka dalam kaitannya bagi geopoltik Rusia. Strategi yang dimaksud adalah Power. Dalam hubungannya dengan Ukraina, Rusia memiliki power, yaitu energi. Rusia memang dikenal memiliki pasokan energi yang besar (gas alam dan minyak bumi) yang menjadi salah satu komoditas utama Rusia bagi hampir seluruh negara-negara di Eropa Barat, termasuk Ukraina.

Ketergantungan Ukraina pada minyak dan gas Rusia sangatlah tinggi. Impor minyak dan gas Ukraina dari Rusia bahkan mencapai 80%. Selain itu di salah satu daerah di Ukraina sendiri terdapat pangkalan Angkatan Laut Rusia, tempat yang dimaksud adalah Krimea, sebuah daerah dimana dulunya adalah bagian dari Rusia, namun dihadiahkan oleh Nikita Kruschev kepada Ukraina pada masa Uni Soviet tahun 1954.[[34]](#footnote-35)

1. **Revolusi Euromaidan**

Revolusi Euromaidan merupakan awal mula terjadinya krisis di Ukraina. Para pendemo yang menamakan dirinya ‘Euromaidan’ melakukan unjuk rasa di Balai Kota Maidan. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mereka atas tindakan pemerintah Ukraina yang memutuskan tidak menadatangani kesepakatan kerjasama Uni Eropa saat *East Partnership Summit* di Vilnius, Lithuania pada 28-29 November 2003.[[35]](#footnote-36)

Para demonstran menuntut beberapa hal kepada pemerintah, yakni membatalkan pemilu yang dipercepat pemerintah, mencabut Undang-Undang Antiprotes, dan menandatangani kesepakatan berasosiasi dengan Uni Eopra.

Aksi demonstran mencapai titik balik penting pada tanggal 17 Desember, ketika Viktor Yanukovich, mencapai kesepakatan dengan Vladimir Putin di mana Rusia membeli 15 Miliar USD obligasi Ukraina dan memangkas harga gas alam yang dijual Ukraina.[[36]](#footnote-37)

Protes anti-pemerintah ini berubah menjadi aksi kekerasan ketika ribuan demonstran menyerang polisi anti huru hara dengan bamboo, kembang api dan bom api di Kyiv. Selanjutnya para demonstran yang merupakan kaum radikal kanan (beraliran fasis) dan Svoboda (beraliran neo-Nazi) turun ke jalan-jalan Kyiv menuntut pergantian rezim.

Situasi tegang di Kyiv membuat parlemen membatalkan UU anti protes dan mengganti dengan menandatangani UU yang memberikan amnesty bagi para demonstrator Euromaidan.

Selanjutnya, pada 16 Januari 2016, Parlemen Ukraina bidang hukum member sanksi berat bagi pelaku kerusuhan di Kiev. Hal itu mengundang aksi anti pemerintah di Ukraina. Aksi tersebut mengakibatkan 80 warga Ukraina tewas dan sekitar 700 orag lainnya luka-luka.

Protes mencapai klimaks selama pertengahan Februari. Pada 18 Februari, bentrokan terburuk Euromaidan pecah setelah parlemen tidak menyetujui tuntutan bahwa Konstitusi Ukraina digulung kembali ke bentuk pra-2004-nya, yang akan mengurangi kekuasaan presiden. Polisi dan demonstran menembakkan senjata, dengan baik peluru tajam dan karet di beberapa lokasi di Kiev. Polisi anti huru-hara maju ke arah Maidan dikemudian hari dan bentrok dengan para demonstran tetapi tidak sepenuhnya menempatinya. Perkelahian terus berlanjut sampai hari-hari berikutnya, dimana sebagian besar korban berjatuhan.

Pihak oposisi menyerukan pengunduran diri Yanukovich dan pembubaran parlemen dengan pemilihan premature untuk mengatur waktu dekat dan kembali ke Undang-Undang Dasar 2004, yang menyerahkan beberapa kekuasaan presiden dengan Perdana Menteri dan Parlemen. Sebuah tuntutan utama adalah bahwa perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa akan ditandatangani segera, dengan rezim bebas visa dengan Eropa yang akan dilaksanakan segera mungkin.[[37]](#footnote-38)

Guna mengakhiri krisis politik berdarah di Ukraina, akhirnya presiden Ukraina Viktor Yanukovich dan tiga pemimpin oposisi utama pada 21 Februari menandatangani kesepakatan untuk melaksanakan pemilihan umum dan mengurangi kekuasaan presiden. Kesepakatan tersebut memperlihatkan perubahan UUD guna mengurangi wewenang presiden, pembetukan pemerintah persatuan nasional dan pemilihan dini presiden, kata kantor pers presiden Ukraina di dalam satu pernyataan. Kesepakatn itu menyerukan penyelenggaraan pemilihan dini presiden tahun ini. Meskipun belum ada tanggal yang ditetapkan. Pemungutan suara tersebut mulanya dijadwalkan diselenggarakan pada Maret 2015. Berdasarkan kesepakatan itu, “ Pemerintah baru nasional” akan dibentuk dalam waktu sepuluh hari. [[38]](#footnote-39)

Namun persetujuan damai antar presiden dan Yanukovich dengan kelompok oposisi tidak berjalan lama karena kekerasan kembali pecah ketika kelompok sector kanan dan Svoboda mengambil alih gedung parlemen Ukraina dan berhadapan dengan polisi anti huru hara Ukraina.

Oleh karenya, parlemen selama akhir pecan melakukan sidang luar biasa secara marathon untuk membentuk pemerintahan transisi termasuk menetapkan Oleksander Turchynov sebagai *acting* presiden Ukraina dan penerapan pemilu pada 25 Mei 2014. Presiden Yanukovich meninggalkan Kyiv menuju Kharkiv, Lugansk, Donetsk dan kemudian ke Rostov.[[39]](#footnote-40)

Kini, pihak oposisi menduduki pemerintahan dan memegang kuasa atas parlemen Ukraina. Verkhovnaya Rada mengumumkan Oleksander Turcinov sebgaai presiden Ukraina dan Arseni Yatsenchuk sebagai Perdana Menteri Ukraina yang baru.

Pada tanggal 28 Pebruari 2014, untuk pertama kalinya presiden Ukraina yang dipecat, Yanukovich tampil dihadapan wartawan di kota Rostov Rusia. Ia menolak pemecatannya dan mengatakan pemerintahannya yang sah terpilih lewat pemilu telah dikudeta. Ia mengatakan lebih lanjut bahwa pemerintahan interin di Kyiv sebagai kelompok pasis dan dibantu oleh BARAT.

1. **Disintegerasi Ukraina**

Tahun 2014 menjadi tahun yang kelam bagi Ukraina, tidak hanya di ibu kota Kyiv saja kerusuhan terjadi tetapi kerusuhan dengan cepat menyebar ke beberapa wilayah Ukraina.

Protes menjalar ke Ukraina selatan yaitu ke daerah Donbass meningkat menjadi pemberontakan saparatis bersenjata. Hal ini menyebabkan pemerintah Ukraina untuk meluncurkan kontra serangan militer terhadap para pemberontak, yang mengakibatkan perang yang terjadi di Donbass.

1. **Referendum Krimea**

Pada 27 Pebruari 2014 dewan tertinggi di Ukraina Republic Otonomi Krimea (bertindak sebagai legislative, semacam DPRD, di Krimea) telah membubarkan pemerintahan daerah Krimea dengan 55 suara (dari 64 anggota) dan memilih Sergey Aksyanov dari Partai Rusia Bersatu sebagai ketua Dewan Menteri Republik Otonomi Krimea ( bertindak sebagai eksekutif di Krimea) dengan dukungan 53 suara. Para anggota DPRD Krimea juga telah memebrikan suara mendukung referendum untuk menentukan masa depan Krimea pada 30 Maret.

Pada 3 Maret 2014, Kepala Staf Angkatan Laut Ukraina yang baru terpilih Denis Bere Zofsky menytakan sumpah kesetiaan bersama Krimea di bawah Sergey Aksyonov, seorang politis pro-rusia yang dipilih perlemen wilayah Krimea sebagai Perdana Menteri setempat. Selain itu, Kepala Keamanan Krimea Petyor Zima, Kepala Departemen Dalam Negeri Krimea Sergey Abisov, Kepala Situasi Darurat Sergey Sehakhov, dan *acting* penjaga perbatasan Krimea Viktor Melanichenko melakukan hal yang sama.

Pembicaraan mengenai referendum di Krimea pertama kali tercetus setelah konfrontasi berkepanjangan antara pihak oposisi dengan pemerintah di Kiev. Konflik tersebut berujung pada bentrokan di Ukraina yang menyebabkan digulingkannya presiden Viktor Yanukovich, yang kemudia mengamankan diri ke Rusia. Slogan anti-Rusia yang digunakan oleh beberapa nasionalis yang mengambil kekuasaan di Kiev membuat warga Ukraina ketakutan, khawatir warga berbahasa Rusia di Ukraina menjadi sasaran.

Resolusi untuk menyelenggarakan referendum ditetapkan oleh parlemen Republik Otonom Krime pada Kamis. Penduduk Krimea diberi dua pilihan, yakni memilih Krimea bergabung dengan Rusia sebagai bagian konstituen dari Federasi Rusia atau memilih untuk mengikuti konstitusi 1992 Republik Krimea dan status Krimea tetap menjadi bagian Ukraina. Kiev menganggap referendum ini tidak sah dengan alasan konstitusi Ukraina tidak member opsi referendum yang diprakarsai oleh pemerintah regional.[[40]](#footnote-41)

Pemerintah Krimea menyatakan, jika mayoritas suara dalam referendum memilih untuk bergabung dengan Rusia, mereka akan mencoba menyelesaikan semua formalitas yang diperlukan secepat mungkin. Menurut juru bicara parlemen Krimea Vladimir Konstaninov, proses penggabungan Krimea ke dalam Federasi Rusia akan memakan waktu maksimal 2 minggu dari hari pelaksanaan referendum.

**Tabel 4 Hasil Akhir dari Republik Otonom Krimea**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pilihan** | **Jumlah Suara** | **Persentase pemilih terdaftar** | **Persentase suara** | **Persentase suara yang sah** |
| Bergabung dengan Federasi Rusia | 1.233.002 | 80,42% | 96,77% | 97,47% |
| Mengembalikan konstitusi 1992 dan tetap menjadi bagian dari Ukraina | 31.997 | 2,09% | 2,51% | 2,53% |
| **Subtotal suara sah** | **1.264.999** | **82,51%** | **99,29%** | **100,00%** |
| Suara tidak sah atau kosong | 9.097 | 0,59% | 0,71% | - |
| Jumlah suara | 1.274.096 | 83,10% | 100,00% | - |
| Pemilih terdaftar yang tidak berpartisipasi | 259.112 | 16,90% | - | - |
| Jumlah pemilih terdaftar | 1.533.208 | 100,00% | - | - |

Sumber: id.wikipedia.org/wiki/referendum\_krimea-2014

Referendum Krimea dilaksanakan pada hari minggu 16 Maret 2014. Hasil pemungutan suara awal meunujukkan 95,5 persen pemilih menyatakan memisahkan diri dari Ukraina untuk menjadi bagian Rusia. Banyak TPS dipenuhi warga yang akan menentukan pilihannya, menafikan angin dingin yang selalu berhembus dalam pertemanan dengan alasn music tradisional mereka, yang mengingatkan pada masa penguasaan Uni Soviet di sana. Dari kejauhan, sekelompok tentara Rusia tanpa tanda pengenal kecuali plat nomor kendaraan Rusia, berdiri memandang kea rah mereka.[[41]](#footnote-42)

Namun majelis umum PBB menolak keabsahan referendum Krimea dengan menmgesahkan resolusi yang menyatakan bahwa referendum Krimea untuk bergabung dengan Rusia tidak sah dan menolak untuk mengakui pengambilalihan Rusia atas semenanjung Krimea. Seratus negara member suara bagi resolusi PBB yang disponsori Ukraina, 11 suara menentang dan 58 abstain. Tidak seperti kebijakan di Dewan Keamanan yang lebih kuat, resolusi Majelis Umum PBB tidak dapat diveto, tetapi resolusi itu tidak mengikat secara hukum.[[42]](#footnote-43)

1. **Referendum Donetsk dan Luhansk**

Dari awal 2014, demostrasi oleh kelompok-kelompok separatis dan anti-pemerintah berlangsung di Donetsk dan Luhansk Oblast Ukraina, bersama-sama sering disebut “Donbass”, pasca revolusi 2014 Ukraina dan gerakan Euromaidan. Para aktivis pro Rusia menyerbu beberapa gedung pemerintahan di kota Luhansk, Ukraina Timur. Para pengunjuk rasa menguasai beberapa gedungn pemerintah dan juga kantor kejaksaan sebelum melepaskan tembakan senjata otomatis kea rah kantor polisi. Presiden sementara Oleksandr Turchynov mengkritik polisi setempat yang disebutkan tidak bertindak.

Penduduk kota Donetsk dan Luhansk di Ukraina bagian timur menjalani pemungutan suara pada hari minggu (11/5) dalam sebuah referendum yang digelar oleh pemberontak pro-Rusia dengan tujuan memisahkan diri dari Ukraina. Sebanyak 2.900 TPS akan dibuka dari pukul 8 pagi waktu setempat (05:00 GMT) sampai 10 malam (19:00 GMT) di dua kota tersebut.[[43]](#footnote-44)

Hasil referendum diumumkan di Donetsk dan Luhansk menunjukakan mayoritas pemilih mendukung pemerintahan sendiri, di tengah operasi militer intensif oleh Kiev yang mengakibatkan sejumlah kematian. Di Luhansk Region 96,2 persen pemilih mendukung pemerintahan sendiri di kawasan ini, menurut angka-angka akhir diumumkan oleh komisi pemilihan local. Meski ada kekhawatiran bahwa di tengah Kiev yang semakin intensif pemberantasan militer yang menewaskan sedikitnya dua warga sipil pada hari referendum.

Setelah referendum, para pejabat dari Republik Rakyat Donetsk memproklamirkan diri belum memutuskan keluar bahwa dalam kass situasi di wilayah tersebut memburuk, mereka mungkin harus meminta pasukan penjaga perdamaian untuk ditempatkan. Pushilin juga mengatakan bahwa dalam beberapa jam Republik Rakyat Donetsk dapat memutuskan apakah akan tetap dengan Ukraina atau tidak. Republic juga telah memutuskan untuk tidak mengambil bagian dalam pemilihan presiden Ukraina pada 25 Mei, menurut laporan media.[[44]](#footnote-45)

1. **Respon NATO Terhadap Konflik Ukraina**

Masalah mulai terjadi ketika NATO berencana memperluas keanggotaannya ke Georgia dan Ukraina di Ukraina pada tahun 2008. Hal ini tentu saja membuat berang Rusia, karena dua negara tedi merupakan benteng terakhir Rusai terhadap Eropa Barat. Bisa dilihat bahwa dua negara ini seakan menjadi benteng Rusia di Laut Hitam, dan memiliki pengaruh besar bagi pertahanan Rusia di bagian Barat-Selatan. Wajar saja Putin berusaha sekuat tenaga mengerahkan pasukannya demi mempertahankan kedua negara tersebut.

NATO seakan ingin ‘melemahkan’ kekuatan Rusia dengan menggoda Ukraina dan Georgia untuk pindah haluan ke Uni Eropa. Terlebih ketika Ukraina mengalami penurunan ekonomi dalam beberapa tahun belakangan, yang seakan membuka jalan NATO endiri tidak bisa masuk mencampuri konflik internal secara terang-terangan karena memang Ukraina semenjak lepas dari Uni Soviet merupakan anggota CIS. Setelah itu Ukraina pun terpecah menjadi dua kubu.

Rakyat yang mendiami Ukraina bagian barat condong diisi oleh para demonstran yang menginginkan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa, sementara mereka yang mendaimi wilayah timur masih memiliki rasa persaudaraan yang tinggi terhadap Rusia, karena memang maoritas penduduk yang mendiami Krimea adalah keturunan Rusia, dan bahasa utamam yang digunakan adalah bahasa Rusia. Krisis Krimea tahun 2014 dimulai pada masa setelah Revolusi Ukraina 2014 dan berpusat di semenanjung Krimea Ukraina, yang lebih dari setengah penduduknya adalah etnis Rusia. Pada bulan Februari 2014, pemerintah nasional pro-Rusia di Ukraina digulingkan dan diganti dengan yang menginginkan Ukraina lebih dekat dengan Uni Eropa.

Ketegangan meningkat antara Euromaidan pro-Eropa dan gerakan rakyat anti-maidan pro-Rusia didorong oleh media Rusia menghadirkan pemerintah Ukraina baru sebagai “fasis” dan “anti-Rusia” dalam referensi untuk Sektor Kanan dan Svoboda. Jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Rusia di Krimea adalah suatu hal yang wajar jika kita melihat dari sisi histpris dan kepentingan bagi Rusia sendiri. Jika bisa digambarkan, Ukraina sepeeti halaman belakang bagi Rusia, untuk itu Rusia turun tangan memperbaiki keadaan internal yang semakin parah di Ukraina. Namun, hal yang terjadi malah sebaliknya. Banyak kecaman dan sorotan kepada negara Rusia atas intervensi yang dilakukannya di Ukraina. Jika kita mau melihat lebih jauh dan dalam dari persoalan yang terjadi saat ini di Ukraina, kita harus bisa memposisikan diri melihat dari perspektif yang tidak melulu dari Barat, tetapi juga dari Rusia itu sendiri.

Peningkatan pasukan NATO di Eropa Timur hanya akan memperparah situasi. Hal itu diungkapkan Jenderal AS, Philip Breedlove. Negara-negara NATO mengurangi anggaran pertahanan mereka setelah akhir Perang Dingin, ketika mereka mulai memandang Rusia sebagai mitra, tetapi sebab langkah Rusia menganeksasi Krimea berdampak besar pada dinamisasi hubungan Moskow dengan NATO. Situasi tersebut membut NATO tidak lagi memandang Rusia sebagai mitra yang sejalan.

Ikut campurnya NATO pada konflik Ukraina ini merupakan tujuan NATO yang memanfaatkan krisis di Ukraina dengan mengerahkan pasukan, pesawat jet tempur dan berbagai kapal perang di Eropa Timur. Menurut Rusia, gebrakan NATO itu hanya untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa mereka masih eksis. Pernyataan itu disampaikan wakil tetap Rusia di NATO, Aleksander Grushko.[[45]](#footnote-46)

Beberapa hari ini, perwakilan NATO telah mengatakan banyak hal, betapa pentingnya bagi aliansi (NATO) untuk membangunkan diri dari tidurnya, dan dilihat dari antusiasme retorika tentang munculnya ancaman baru di Eropa, NATO berusaha maksimal memanfaatkan krisis Ukraina untuk membuktikan bahwa NATO masih dibutuhkan saat ini, kecurigaan NATO, bahwa Rusia ingin melakuakan ekspansi ke Eropa Timur menjadi alasan NATO untuk bergerak. Basis argumen ini sedang dibangun, NATO berupaya membuktikan seolah-olah Rusia sedang menciptakan ancaman baru.

Dalam sebuah media, menuliskan bahwa NATO telah mengintervensi Ukraina, Sekjen NATO, memperingatkan pihak Rusia agar tidak ikut campur dalam urusan di Ukraina, dan meminta Rusia menarik mundur kembali pasukannya, “Jika Rusia mencoba mengintervensi Ukraina, maka itu akan menjadi masalah kesalahan bersejarah. Hal ini itu akan mempengaruhi hubungan kami dan Rusia, dan kelak Rusia akan diisolasi dunia internasional,” ungkap Sekjen NATO,Anders Fogh Rasmussen, seperti dilansir Reuters.[[46]](#footnote-47)

1. *NATO Handbook: Partnership and Cooperation*. (Brussels, NATO Office of Information and Press, 1992, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-2)
2. Schwarz, Benjamin, “*NATO Enlargement and the Inevitable Costs of the American Empire”,* dalam *Ted Galen Carpenter (ed.), NATO Enlargement: Illusions and Reality,* Cato Institute, Washington, 1998, hlm.74. [↑](#footnote-ref-3)
3. ibid [↑](#footnote-ref-4)
4. Nurani Chandrawati. 2004. Jurnal Luar Negeri (*Eropa Tengah dan Timur Bagi Indonesia*) Penggabungan Eropa Tengah dan Timur ke dalam Uni Eropa: analisis dampak bagi Indonesia.BPPK KEMLU. [↑](#footnote-ref-5)
5. Op.cit NATO Handbook: Partnership and Cooperation, hlm 179. [↑](#footnote-ref-6)
6. Charles W. Kegley, Jr. and Eugene R. Wittkopf, *World Politics, Trend and Transformation, sixth ed., St. Martin’s Press: New York, 1997,* hlm. 455*.* [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid. hlm 455-456. [↑](#footnote-ref-8)
8. Ronald Steel, *“Beyond NATO*”, dalam Ted Galen Carpenter *(ed.), NATO Enlargement: Illusions and Reality,* Cato Institute Washington, 1998, *p.245.* [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibid. hlm 245, [↑](#footnote-ref-10)
10. Ibid. hlm 246. [↑](#footnote-ref-11)
11. ibid. hlm. 247. [↑](#footnote-ref-12)
12. Henry Kissinger, *Diplomacy,* Simon & Schuster: New York, 1994, hlm 536. [↑](#footnote-ref-13)
13. Jurnal Nurani Chandrawati. 2004. [↑](#footnote-ref-14)
14. Emeria W.A siregar. 2004. *Slovakia Dalam Aliansi Transatlantik: Suatu Kebangkita Politik;* Hubungan Internasional; Percikan pemikiran Diplomat Muda. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 170. [↑](#footnote-ref-15)
15. Dwight D. Eisenhower, “*Let’s Be Honest with Ourselves,” Saturday Evening Post,* 26 Oktober 1963, hlm 26. [↑](#footnote-ref-16)
16. “*Text of the North Atlantic Treaty,* 4 April 1949”. www.nato.int/basictxt/treaty.htm,. Akses taggal 15 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-17)
17. Laporan Sementara (Interim Report).2008. Deklarasi Kemerdekaan Sepihak Kosovo; Tantangan terhadap Hukum Internasional dan Resolusi Konflik. Jakarta. BPPK KEMLU. Hal 7 [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibid hlm. 8 [↑](#footnote-ref-19)
19. A. Agus Sriyono. 2004. *Transatlantik di Simpang Jalan.* Hubungan Internasional; Percikan pemikiran Diplomat Muda. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 175 [↑](#footnote-ref-20)
20. Joshua S. Goldstein and Jon. C. Pevehouse. 2010. International Relation; Ninth Edition: Pevehouse-9th ed. Page 65 [↑](#footnote-ref-21)
21. W. Bruce Weinrod and Charles L. Barry. 2010. NATO Command Structure Considerations for the Future. Center for Technology and National Security Policy National DefenseUniversity(http://www.ndu.edu/CTNSP/docUploaded/DTP%2075%20NATO%20Command%20Structure.pdf, diakses tanggal 16 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-22)
22. Linda Gordon, *Cossak Rebellion: Social Furmoil in the Sixteenth Century*, Ukraine State, University of New York, 1983, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-23)
23. Http;//Britannica.com/EBchecked/topic/612921/Ukraine/30089/Parliamentarydemocracy#toc30090, diakses pada 19 Mei 2016. [↑](#footnote-ref-24)
24. http;//www.president.gov.ua/en/content/presiden.html, diakses pada 19 Mei 2016. [↑](#footnote-ref-25)
25. Ibid [↑](#footnote-ref-26)
26. http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign\_policy\_of\_Ukraine&=ALkJrhg4Ku51Q3F80wYQJfLe-PVTfoZ17Q diakses pada tanggal 20 Mei 2016. [↑](#footnote-ref-27)
27. http://www.kyivpost.com/news/nation/detail67901/ diakses pada tanggal 20 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-28)
28. Http://en.interfax.com.ua/news/general/241388.html diakses pada tanggal 20 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-29)
29. http://www.euronews.com/2014/12/23/ukraine-s-complicated-path-to-nato-membership/ diakses pada tanggal 20 Mei 2016. [↑](#footnote-ref-30)
30. http://www.wsj.com/articles/ukraine-ends-nonaligned-status-earning-quick-rebuke-from-russia-1419339226, diakses pada tanggal 20 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-31)
31. Zbigniew Brzenziski, *The Grand Chessboard:*  *American Primacy and Its Geostrategic Imperatives,* Basic Books, United States, 1997, hlm. 123-125 [↑](#footnote-ref-32)
32. Ibid, hlm. 37-40. [↑](#footnote-ref-33)
33. Ibid, hlm. 41-43. [↑](#footnote-ref-34)
34. http://luar-negeri.kompasiana.com, [↑](#footnote-ref-35)
35. http://www.indonesia.rbth.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-36)
36. Nadia Diuk, “Euromaidan: Ukraine’s Self Oranizing Revolution” dalam http://wwww.worldaffairsjournal.org/article/euromaidan-ukraine%E280%99s-self-organizing revolution, diakses pada 20 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-37)
37. Ibid, Nadia Diuk [↑](#footnote-ref-38)
38. <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/02/22/n1de3x-pemerintah-dan-oposisi-Ukraina-tandatangani-kesepakatan-pemilu-damai>, diakses pada 20 Mei 2016. [↑](#footnote-ref-39)
39. Laporan dari direktorat Eropa tengah dan Timur kementrian luar negeri RI. [↑](#footnote-ref-40)
40. http://indonesia.rbth.com/politik/2014/23/17/krimea\_gelar\_referendum\_untuk\_gabung\_dengan\_rusia\_23415.html, diakses pada 20 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-41)
41. http://ww.antaranews.com/berita/422522/referendum-krimea-bisa-benturkan-amerika-serikat-rusia, diakses pada 20 Mei 2016. [↑](#footnote-ref-42)
42. http://www.voaindonesia.com/content/majelis-umum-pbb-nyatakan-referendum-krimea-tidak-sah/18880968.html, diakses pada 20 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-43)
43. http://www.satuharapan.com/read-detail/read/referendum-digelar-pemberontak-ukraina-di-donetsk-dan-luhansk, diakses pada 20 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-44)
44. http://rt.com/news/158276-referendum-results-cast-ukraine/ diakses pada tanggal 20 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-45)
45. http://analisdaily.com/, diakses pada 20 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-46)
46. Elizabeth Piper (25 Februari 2014), “Russia evokes World War Two in media blitz on Ukraine”, Reuters, diakses pada tanggal 21 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-47)